

TATA PEMERINTAHAN JAWA DALAM SERAT WEJANGAN WEWARAH BANTAH CANGKRIMAN PIWULANG KAPRAJAN

oleh

Suardi Endraswara

FBS Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

The present research was designated to portray the government order reflected in the Serat *Wejangan Wewarah Bantah Cangkriman Piwulang Kaprajan* (S2BCPK). This research is objetived on the Javanese government order in the S2BCPK. The problem at describing on form and meaning of government order. The subject of this research was S2BCPK, collector by Marwanta. The works contained of shadow play on dialog and debate (*bantah*) among figure.

The analysis focused on the aspects pragmatic values from dialog and debate of shadow play. The research employed a cualitative descriptive method and interpretation (hermeneutics) method. This study is based on the reflection of Javanese wisdom form in the government order. The finding reveal four spesific characteristic of the government order: (1) relation among state. The state must be kept principal of *rukun* and justice; (2) responsibility of citizen. The citizen must be loyal action to leadership; (3) government order of wisdom. The government don't spoil to citizen, must be selected to citizen, and don't angry to citizen; (4) government order of prestigeful. This indicated in: (a) justice action, (b) give someone the task of precise, and (c) govern manner of firm.

Keywords: *government order, Javanese, and shadow play.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sejak tumbangnya pemerintahan Soeharto lalu memasuki era reformasi, tata pemerintahan Indonesia sedang mencari bentuk. Bentuk tata pemerintahan yang dikehendaki adalah sistem demokrasi dalam masyarakat Indonesia baru. Namun, pembentukan sistem demokrasi dalam masyarakat Indonesia baru yang serba plural ini tidak mudah, karena masih ada sisa-sisa tata pemerintahan lama

yang berbau otokratik. Tata pemerintahan otokratik dipandang tidak seluruhnya cocok untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa selama ini.

Dalam keadaan demikian, jelas dibutuhkan suatu model atau teladan tentang pemerintahan baru yang demokratis dan egalitarian. Untuk itu, patut ditengok kembali konsep dasar tata pemerintahan yang pernah dikemukakan oleh para pujangga Jawa, terutama yang terkonsep dalam kisah

pewayangan. Hal ini patut dipahami karena dunia pewayangan tidak lain merupakan gambaran hidup manusia pula. Di antara cerita wayang yang memuat konsep tata pemerintahan adalah yang tersurat dalam *Serat Wejangan Wewarah Bantah Cangkringan Piwulang Kaprajan* selanjutnya disebut SW2BCPK, dihimpun oleh Marwanto S. Kar tahun 2001.

Himpunan wejangan dari lakon-lakon wayang kulit tersebut, tampak banyak menawarkan konsep tata pemerintahan, terutama tata pemerintahan Jawa. Hal ini memang cukup beralasan karena kisah pewayangan tersebut merupakan refleksi gagasan pujangga besar yang berusaha menyikapi tata pemerintahan pada masanya yang sangat feodal dan otokratik. Atas dasar ini, menarik untuk diungkap pandangan-pandangan pujangga tersebut, yang kemungkinan besar ada relevansinya dengan pemerintahan Indonesia baru nanti.

2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah hendak mengungkap: (1) wujud tata pemerintahan dalam SW2BCPK. Dari wujud ini diperoleh gambaran ajaran tata pemerintahan yang kelak masih dapat dimanfaatkan bagi penyelenggaraan negara. *Wejangan* yang berupa himpunan kisah pewayangan ini dicari konsepsi tata pemerintahannya; (2) makna tata pemerintahan Jawa dalam SW2BCPK. Melalui pengungkapan dua hal tersebut dapat ditangkap esensi tata pemerintahan Jawa yang kelak dapat dipergunakan bagi siapa saja.

3. Landasan Teori

Upaya ke arah hal demikian, memang cukup beralasan karena menurut Horatius (Dahana, 2001 : 23) karya sastra sebagai pijaran kenyataan akan menjadi sebuah *movere*. Maksudnya, sastra bisa menggerakkan pembaca. Berarti, pengungkapan nilai tata pemerintahan Jawa dalam SW2BCPK pun pada gilirannya akan menggerakkan pembaca ke arah perwujudan pemerintahan ideal. Hal ini patut dipahami, sebab banyak pihak masih meyakini bahwa karya sastra akan menjadi sebuah *agent of change*. Istilah ini sejalan dengan pandangan pragmatik sastra Abrams (Soeratno, 1994:5) yang menyatakan bahwa sastra itu *to achieve certain effects on the audience*. Karya sastra ... *is a means to and end and an instrument for getting something done, and tends to judge its value according to its success in achieving the aim*.

Dari pendapat demikian, cukup menegaskan betapa penting peran karya sastra bagi pembaca atau audience. Pesan yang terdapat dalam karya sastra akan mampu mengubah sikap dan perilaku penikmatnya. Pesan sastra ada kalanya disampaikan dalam bentuk *wejangan* (ajaran). Ajaran inilah sebenarnya merupakan wujud fungsi sastra yang digagas oleh Horatius dalam istilah *dulce et utile* (Budianta, dkk. 2002:19). Artinya, karya sastra amat memuat aspek keindahan dan kegunaan. Aspek keindahan ajaran dalam karya sastra disampaikan melalui *bantah* (dialog kritis) dan aspek kegunaan berupa makna ajaran tersebut.

Dalam kaitan itu, apabila kita berpijak pada gagasan Eagleton (2002: 46) cukup sah apabila karya sastra yang lahir juga bernuansa *tendensius, partaiminded, optimis, dan heroik*. Dari sisi ini, sekaligus mematahkan adanya keraguan berbagai pihak terhadap sastra. Terutama, pandangan sempit yang menyatakan bahwa karya sastra ibarat kotoran yang dikerumuni cacing, dan atau sebagai kebohongan sejarah. Dari gagasan semacam ini akan menegaskan bahwa karya sastra, apapun wujudnya akan mengusung pesan muji-rab bagi penikmatnya. Faktor edukasi sastra ini, menurut Ratna (2003: 256) seringkali membawa penikmat ke arah berbagai hal seperti ke soal nasionalisme dan emansipasi. Berbagai hal ini sebenarnya amat luas, bergantung pada penafsiran masing-masing pembaca, begitu pula yang termuat dalam karya sastra pun tergantung pula situasi dan pemikiran pengarangnya. Pada saat negara sedang tidak jelas arah pemerintahannya, kemungkinan besar pengarang akan menyampaikan sesuatu bagi pemerintahan yang diidolakan.

Bertolak dari pendapat semacam itu, tidak keliru jika Sarjono (2001: 10-11) menyatakan bahwa sebagai kegiatan budaya, kesehatan kehidupan sastra bergantung pada kesehatan ekologi dan habitat kebudayaan tempat ia hidup. Dari pernyataan ini akan muncul pandangan sebaliknya, bahwa lingkungan akan banyak berpengaruh terhadap karya sastra. Itulah sebabnya, karya-karya sastra Jawa yang diciptakan pujangga

jelas akan terkait dengan berbagai tanggapan tentang jamannya. Berbagai pergolakan pemerintahan Jawa pada masanya, akan membingkai pujangga untuk melahirkan idealisme, dan pada gilirannya akan lahir berbagai gagasan tentang tata pemerintahan Jawa yang ideal.

Dalam tata pemeritahan Jawa yang kratonik, sebuah negara selalu ada dua elemen manusia, yaitu pengorganisasi dan yang diorganisasi, pemerintah dan pengikut, raja dan rakyat, dan atau *panggedhe* dan *wong cilik* (Laksono, 1985: 38). Hubungan antara dua elemen tersebut diharapkan menuju suatu titik yang menyenangkan. Keduanya harus menciptakan suasana keseimbangan dalam berbagai hal, agar tercapai hidup yang mulia. Aspek terpenting dari sistem pemerintahan Jawa adalah tercapainya derajat manunggaling kawula-Gusti. Tingkat inilah yang menghendaki bahwa pemimpin dengan yang dipimpin memiliki kedudukan yang sama.

Diakui atau tidak kadang-kadang tata pemerintahan Jawa, masih memanfaatkan faktor-faktor spiritual. Berbagai hal yang terkait dengan mistic masih sering mewarnai kehidupan pemerintahan di Jawa. Hal semacam ini, seringkali juga memunculkan aneka karya sastra spekulatif yang disebut *sastra jangka*. Artinya, karya sastra yang merefleksikan ramalan-ramalan, seperti halnya ramalan R. Ng. Ranggawarsita terhadap datangnya ratu adil (Purwadi, 2003: 12). Dari aneka ramalan itu, membuktikan idealisme pujangga terhadap hadirnya sebuah tata pemerin-

tahan yang nyaman. Dalam istilah pewayangan kondisi semacam ini dinamakan keadaan yang *tata titi tentrem kerta raharja*.

Adanya spekulasi pujangga ataupun pemanfaatan aspek mistik dalam pemerintahan kadang-kadang mendapat tantangan dari berbagai pihak. Kesangsian pengaruh mistik ke dalam dunia kekuasaan pernah menarik perhatian di era presiden Soekarno. Pada waktu itu, presiden sempat mengingatkan tentang bahaya praktik *klenik* (ilmu hitam). Waktu itu, ada kekhawatiran munculnya kebatinan di Jawa yang mengarah pada *klenik*. Banyak pihak tak setuju terhadap peringatan tersebut, sebab kebatinan sebenarnya menjalankan mistik kejawen sebagai ilmu putih. Akhirnya di era Soeharto justru banyak memanfaatkan mistik kebatinan dalam tata pemerintahan. Prinsip yang dianut waktu itu, sekurang-kurangnya memuat ungkapan bahwa, *orang Jawa suka meredam (tidak senang konflik), bersikap 'ngalah' (mengalah), mawas diri, dan mengendalikan diri*. Jika sikap kultural ini terpahami oleh pelaku kekuasaan, cepat atau lambat tentu akan terwujud budaya yang mantap (Endraswara, a2003: 232-234).

Atas dasar itu, terobosan spiritual pada tata pemerintahan pun sah saja dilakukan sepanjang tidak merugikan pihak lain. Dalam kaitan ini sesuai dengan pendapat Antlov dan Cederroth (2001:22) yang pernah berpendapat bahwa kehadiran Golkar di orde baru memang telah memiliki massa yang menguatkan mis-

tik kejawen. Dari paham ini mistik kejawen dipandang mampu mengungkap nilai-nilai tradisional yang cocok untuk kehidupan kekuasaan. Akibatnya, tak jarang di antara pelaku kekuasaan yang sempat memiliki guru spiritual. Guru spiritual inilah yang akan menunjukkan jalan mistik, agar roda pemerintahan lancar-lancar saja. Karena itu, di Jawa ada yang disebut *ideology of gentle hints* (ideologi perintah halus). Yakni, suatu perintah yang menggunakan "komando" batin. Meskipun hal semacam ini semi otokratik, namun pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena pemerintahan orde baru sering meniru era kerajaan, bahwa seorang raja berkuasa penuh.

Hal tersebut telah dikauhi oleh Anderson (1972: 5-8) yang menjelaskan bahwa kekuasaan dalam pola pikir budaya Jawa berbeda dengan kekuasaan di Barat. Di Jawa kekuasaan memiliki ciri-ciri: (1) *kekuasaan itu konkret*, artinya kekuasaan itu adalah bentuk realitas seperti kekuatan yang ada pada batu, kayu, api dan sebagainya. Kekuasaan adalah "daya" yang merupakan kaitan paham animisme desa dengan paham panteisme metafisik perkotaan, (2) *kekuasaan itu homogen*, kekuasaan itu sama sumbernya, dan (3) *jumlah kekuasaan di alam semesta selalu tetap*. Alam semesta tidak bertambah luas dan sempit. Pendek kata, kekuasaan Jawa sangat terkait dengan konsep *kasekten*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teks sastra berupa *Serat Wejangan Wewarah Bantah Cangkringan Piwulang Kaprajan*. Alasan pemilihan bahan kajian ini karena di dalamnya banyak mengungkapkan ajaran-ajaran tata pemerintahan Jawa. Teks ini merupakan kumpulan berbagai wejangan yang dikutip dari lakon wayang kulit bersifat simbolis. Kutipan-kutipan tersebut memuat sekian macam wejangan, seperti halnya mistik, tata pemerintahan, keagamaan, dan sebagainya. Penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah tata pemerintahan seperti keadilan, demokrasi, kenegaraan, pengabdian dan sejenisnya lebih dominan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur kebahasaan dan pembacaan hermeneutik berdasarkan konvensi kesastraan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan adalah (a) membaca secara keseluruhan kutipan ajaran yang terdapat dalam subjek penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara umum makna tata pemerintahan, (b) membaca secara cermat sekaligus dilakukan kegiatan menganalisis bait, kalimat, paragraf, dan dialog, dan (c) mencatat hasil pembacaan yang berhubungan dengan konsep tata pemerintahan ke dalam kartu. Data penelitian ini berupa dialog antar tokoh wayang berbentuk prosa dan puisi (tembang). Semua data dipilih ba-

gian-bagian yang merepresentasikan tata pemerintahan Jawa. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh penjelasan rinci, tentang model tata pemerintahan Jawa tersebut.

Pemaknaan dilakukan dengan cara interpretasi. Interpretasi memandang kutipan lakon wayang sebagai teks sastra merupakan gejala yang memiliki jaringan sistem dengan penutur, dunia acuan, maupun penanggap. Langkah pemaknaan demikian sering disebut hermeneutik sastra (Endraswara, b2003: 42). Hermeneutik merupakan penafsiran sastra sebagai teks. Dalam hal ini teks wejangan, ditafsirkan tidak secara dialektik yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, melainkan tafsir atas bagian terhadap keseluruhan cerita. Bagian yang ditafsirkan berupa unit-unit dialog, lalu dihubungkan secara menyeluruh sejalan dengan konteks cerita. Dari sini baru diperoleh makna yang utuh dan meyakinkan. Dalam kaitan ini, peneliti berusaha memahami wejangan tata pemerintahan sebagai sebuah teks referensial. Artinya, di dalamnya merupakan refleksi dunia acuan dan pesan bagi pembaca. Kemungkinan besar, dalam teks wejangan tersebut juga memaparkan himbauan tertentu tentang tata pemerintahan.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji refleksi konsep tata pemerintahan adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi data wejangan yang memuat konsep tata pemerintahan, (2) mengklasifikasikan kutipan wejangan wayang kulit yang memuat konsep tata pe-

merintahan, (3) menafsirkan makna wejangan tata pemerintahan, (4) interpretasi dihubungkan dengan konteks ceritera masing-masing lakon wayang kulit, dan (5) menyajikan pembahasan. Untuk membantu analisis dilakukan penerjemahan teks ke dalam bahasa Indonesia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

SW2BCPK merupakan kutipan inti wejangan tokoh wayang yang amat berharga, yang memuat aneka dialog berupa wejangan tata pemerintahan. Kisah-kisah pewayangan tersebut melukiskan aneka tata pemerintahan khas Jawa yang meliputi hubungan antar negara, tanggung jawab warga negara, pemerintahan yang bijaksana, dan pemerintahan yang berwibawa. Idealisme pemerintahan Jawa yang terkandung dalam kajian ini, dapat digunakan oleh siapa saja yang hendak menjadi warga negara yang baik dan pemerintah yang bijak. Atas dasar ini, peneliti memang sengaja tidak mencari relevansi tata pemerintahan dalam teks sastra dengan pemerintahan masa kini. Masalah relevansi dipersilakan kepada pembaca untuk mencermati, jika hal demikian diperlukan. Karena, apa yang terpapar dalam teks merupakan sebuah wacana idealisme sedangkan pemerintahan nyata merupakan wacana yang tidak pernah stabil.

Wujud tata pemerintahan melukiskan tata pemerintahan Jawa. Tata pemerintahan memang tidak melukiskan seluruh aturan dan struktur pemerintahan Jawa yang lengkap.

Tata pemerintahan hanya berupa relasi antara dua golongan, yaitu *wong gedhe* (pemerintah) dan *wong cilik* (warga negara). Seluruh wujud tata pemerintahan tersebut berasal dari dialog-dialog wayang kulit. Dialog terbagi menjadi dua golongan. Pertama, berupa kutipan lakon wayang kulit. Kedua berupa kutipan dari beberapa serat yang memuat lakon wayang. Lakon-lakon wayang yang tertera dalam data, yaitu: (1) *Makutharama*, (2) *Begawan Kilatbuwana*, (3) *Begawan Mintaraga*, (4) *Pendhawa Dhadhu*, (5) *Wahyu Pancadarma*, dan (6) *Jumenengan Parikesit*. Sedangkan yang berupa kutipan serat berasal dari: (1) *Serat Pustakarajapurwa*, (2) *Serat Anglingdarma*, (3) *Serat Darmasarana*.

Tata pemerintahan dalam SW2 BCPK menggambarkan empat kunci pokok keberhasilan pemerintahan, yaitu: (1) hubungan antar negara, (2) tanggung jawab warga negara, (3) tata pemerintahan yang bijaksana, dan (4) tata pemerintahan yang berwibawa. Dari empat wujud tata pemerintahan tersebut memiliki makna yang menuju pada sistem pemerintahan yang ideal. Apabila pemerintah dan warga negara mampu menjalankan lima hal itu sebaik-baiknya, maka negara akan aman, tenteram, dan damai. Sebaliknya, kalau di antara lima hal itu ditinggalkan cepat atau lambat negara akan mudah runtuh.

2. Pembahasan

Dari makna yang terkandung dalam empat kunci pokok keberhasilan pemerintahan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, hubungan antar negara menghendaki agar tercapai hubungan yang rukun dan bersatu-padu. Dari berbagai dialog, dapat diketengahkan beberapa tata pemerintahan yang menghendaki seorang pemimpin harus bertindak rukun dan bersatu-padu. Hal ini terungkap pada saat dialog antara Begawan Kilat Buwana dengan Kresna. Sang Begawan sebenarnya menghendaki agar Perang Baratayuda antara Kurawa dengan Pandawa digagalkan, karena hanya akan menelan korban. Dalam perang hanya akan memakan korban harta benda, rakyat kecil, dan akan menimbulkan kematian bagi mereka yang tidak berdosa. Perang hanya akan melahirkan kebencian di antara hubungan negara.

Dari dialog juga tampak bahwa Begawan Kilatbuwana pandai berminyak air. Dalam pembicaraan, dia tampak bersih, mempunyai keinginan luhur, karena berniat menggagalkan peperangan. Dalih yang digunakan adalah bagaimana menata hubungan antar negara. Hubungan antar negara, terlebih lagi masing-masing pemimpin negara masih saudara diibaratkan *ngumpulake balung pisah daging renggang*, artinya menyatukan saudara yang lama terpisah. Dengan pura-pura menyentuh masalah kerukunan, Kilatbuwana bermaksud menggagalkan Perang Baratayuda. Pasalnya, perang diakui atau tidak jelas membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Hal semacam ini jelas menjadi larangan para dewa. Namun, dalam kutipan itu Prabu Kresna justru dapat membalik pembicaraan Bega-

wan Kilatbuwana. Kresna dapat menuduh kalau dewa sebagai pimpinan seringkali kalau berbuat masih menyimpan pamrih.

Hal itu dapat dilihat pada niat Kilatbuwana, yang sebenarnya ingin mencelakakan Pandawa dengan menggagalkan Baratayuda. Perang Baratayuda adalah peperangan besar antara saudara (darah) Bharata. Doktrin perang besar ini telah menjadi kepastian dewa. Perang dahsyat itu nanti berupa ujian terhadap kebenaran. Pihak yang salah akan kalah dan yang benar akan menang. Karenanya, siapa yang hendak menggagalkan tentu memiliki maksud lain. Hal ini bisa dipahami, bagaimana siasat licik Kilatbuwana. Karena yang menjadi tumpuan perang adalah warisan Tanah Ngastina, maka Kilatbuwana berprinsip tidak akan memberikan kepada Pandawa, meskipun Baratayuda telah gagal. Itulah sebabnya Kresna sebagai tokoh pendukung darma, sebenarnya mau saja menyaksikan gagalnya Baratayuda asalkan orang Ngastina dapat bersikap adil. Artinya, Tanah Ngastina harus menjadi milik Pandawa, sebab dahulu hanya dititipkan oleh Pandudewanata (ayah Pandawa) kepada Destarastra (ayah Kurawa).

Melalui dialog dapat disimpulkan bahwa hubungan antar negara dalam tata pemerintahan Jawa disyaratkan antara lain: (1) pemegang tata pemerintahan seharusnya bertindak tanpa pamrih, (2) jika ada permasalahan tidak diselesaikan dengan jalan peperangan; (3) penyelesaian sebuah konflik negara dilakukan secara adil,

- Dahana, Radhar Panca. 2001. *Kebenaran dan Dusta dalam Sastra*. Magelang: Indonesiatara.
- Eagleton, Terry. 2002. *Marxisme dan Kritik Sastra*. Terjemahan Roza Muliati. Yogyakarta: Sumbu.
- Endraswara, Suwardi. a2003. *Mistik Kejawen*. Yogyakarta: Narasi.
- _____. b2003. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Laksono. 1985. *Tradisi dan Struktur Masyarakat Jawa; Kerajaan dan Pedesaan*. Yogyakarta: Gamapress.
- Marwanto. 2001. *Serat Wejangan Wewarah Bantah Cangkringan Piwulang Kaprajan*. Solo: Cenderawasih
- Purwadi. 2003. *Ramalan Sakti Prabu Jayabaya*. Yogyakarta: Persada.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2003. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Kota Pelajar.
- Sarjono, Agus R. 2001. *Sastra dalam Empat Orba*. Yogyakarta: Bentang.
- Soeratno, Siti Chamamah. 1994. *Sastra dalam Wawasan Pragmatik; Tinjauan atas Azas Relevansi di dalam Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM, 24 Januari.